



PEDOMAN TEKNIS

GERCEP KB (GERAKAN CEPAT PELAYANAN KELUARGA BERENCANA) TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang berjudul “*Gerakan Cepat Pelayanan KB (GERCEP KB)*”.

Proposal ini disusun sebagai upaya untuk memberikan solusi atas berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Empat Lawang yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam dan aksesibilitas yang terbatas. Inovasi ini dirancang untuk mengubah pola pelayanan yang ada menjadi lebih efektif, efisien, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dokumen ini. Kami berharap proposal ini dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yang terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan pembangunan daerah, serta pencapaian tujuan program kependudukan dan keluarga berencana. Kami juga membuka diri terhadap segala saran dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan inovasi ini di masa mendatang.

Tebing Tinggi, April 2026
Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Empat Lawang.



Dra. Rita Purwaningsih, M.M
NIP. 196805151997032006

ROPOSAL INOVASI	Error! Bookmark not defined.
GERAKAN CEPAT PELAYANAN KB (GERCEP KB).....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	2
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. TUJUAN.....	5
C. MANFAAT	6
D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH	7
E. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	8
BAB II KERANGKA PIKIR	10
A. KEBAHARUAN.....	10
B. DESAIN INOVASI.....	11
C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES INOVASI.....	12
BAB III TAHAPAN PROSES PENCIPTAAN INOVASI	16
1. Tahap Inisiasi dan Identifikasi Permasalahan	16
2. Tahap Perancangan Sistem dan Pengembangan Mekanisme Kerja.....	16
3. Tahap Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana.....	17
4. Tahap Uji Coba dan Penerapan Awal	18
5. Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan Menyeluruh	19
BAB IV PENUTUP	20
A. KESIMPULAN.....	20
B. SARAN	208

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki karakteristik wilayah dengan kondisi topografis yang beragam, sebagian besar berupa daerah bergelombang dan berbukit yang termasuk dalam rangkaian Pegunungan Bukit Barisan di wilayah barat Pulau Sumatera. Wilayah kabupaten ini memiliki variasi ketinggian yang signifikan, yaitu berkisar antara 50 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Sebanyak 64% wilayahnya berada di ketinggian 300–450 mdpl, sedangkan wilayah bagian selatan dan timur bahkan mencapai ketinggian antara 500 hingga 700 mdpl. Kondisi geografis ini menyebabkan aksesibilitas antarwilayah menjadi terbatas, perjalanan membutuhkan waktu yang lama, serta menimbulkan hambatan dalam penyebaran informasi dan penyelenggaraan berbagai jenis pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Empat Lawang bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama yang diusahakan berupa kopi, padi, karet, serta berbagai jenis tanaman palawija seperti kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Tempat usaha dan lahan pertanian masyarakat umumnya terletak jauh dari pemukiman penduduk, sehingga sebagian besar waktu kerja mereka dihabiskan di lokasi usaha yang aksesnya sulit dijangkau. Kondisi ini menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan yang selama ini hanya diselenggarakan di pusat-pusat pelayanan resmi seperti puskesmas, klinik, atau kantor dinas yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal maupun tempat bekerja.

Berdasarkan data dan pengamatan di lapangan, capaian penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah Kabupaten Empat Lawang masih tergolong rendah, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah yang akses jalannya sulit dilalui. Masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, antara lain: jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan lokasi pelayanan kesehatan, keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat untuk meninggalkan pekerjaannya guna mengurus keperluan pelayanan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai manfaat, cara kerja, serta keamanan alat kontrasepsi, adanya rasa takut yang tidak beralasan terhadap kemungkinan efek samping penggunaan alat kontrasepsi, serta berkembangnya pandangan negatif atau stigma sosial di masyarakat yang menilai penggunaan alat kontrasepsi tertentu sebagai hal yang tidak baik atau berbahaya.

Selain kendala yang dialami oleh masyarakat, kader keluarga berencana yang tersebar di seluruh wilayah kerja juga menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jarak antarwilayah yang jauh dan akses yang terbatas menyebabkan terjadinya keterbatasan komunikasi, kesulitan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terkait kebijakan dan program yang dijalankan, serta hambatan dalam berkoordinasi baik antar sesama kader maupun dengan pihak instansi pelaksana program. Akibatnya, upaya penyuluhan, pendampingan, dan penggerakan masyarakat yang menjadi tugas utama kader belum dapat berjalan secara efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten.

Untuk mengatasi seluruh permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan tersebut, diperlukan sebuah terobosan baru dalam sistem penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah serta kebutuhan nyata masyarakat. Inovasi yang diberi nama **Gerakan Cepat Pelayanan KB (GERCEP KB)** dirancang sebagai solusi strategis yang bertujuan untuk memangkas hambatan geografis dan waktu, sekaligus menjadi wadah edukasi dan penguatan kapasitas yang berkesinambungan.

Melalui inovasi ini, pola pelayanan yang semula bersifat pasif menunggu masyarakat datang ke tempat pelayanan diubah menjadi pola pelayanan yang aktif, di mana tim pelayanan yang akan mendatangi masyarakat dengan proses yang cepat, prosedur yang sederhana, serta tetap mengutamakan kualitas pelayanan dan kenyamanan penerima layanan.

Inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi media untuk memperkuat peran dan fungsi kader keluarga berencana melalui kegiatan komunikasi dan koordinasi yang terstruktur, sehingga setiap kendala yang ditemukan di lapangan dapat segera diselesaikan bersama dan terwujud kesatuan langkah dalam mencapai tujuan program kependudukan dan keluarga berencana daerah.

B. TUJUAN

Tujuan Umum

Meningkatkan cakupan, kualitas, dan pemerataan pelayanan keluarga berencana di seluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang, khususnya dalam penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta berkontribusi nyata dalam upaya penurunan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan terencana sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Tujuan Khusus

1. Mempermudah akses bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama Pasangan Usia Subur (PUS) yang berada di daerah terpencil, wilayah perbatasan, dan daerah yang aksesnya sulit dijangkau, untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan mengorbankan waktu kerja serta biaya yang besar.
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat mengenai berbagai jenis alat kontrasepsi, manfaat penggunaannya, cara penggunaan yang benar, serta menghilangkan kesalahpahaman dan stigma negatif yang berkembang di masyarakat terkait pelayanan keluarga berencana.
3. Memperkuat peran, kemampuan, dan kinerja kader keluarga berencana melalui media komunikasi, pertemuan, dan pelatihan yang terstruktur, sehingga tercipta kesamaan persepsi, kesatuan langkah, dan solidaritas kerja yang baik antar sesama kader maupun dengan instansi terkait.
4. Menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi jangka pendek yang memiliki risiko berhenti pakai lebih tinggi, serta meningkatkan jumlah pengguna MKJP yang terbukti lebih efektif, aman, dan berjangka waktu panjang dalam menjarangkan atau menghentikan kehamilan sesuai rencana keluarga.
5. Menyediakan pelayanan yang menjaga kerahasiaan data dan kondisi kesehatan masyarakat, memberikan kenyamanan serta mengurangi rasa canggung atau ketidaknyamanan yang sering dirasakan saat mengakses pelayanan kesehatan reproduksi.
6. Mempercepat proses penyampaian informasi, penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan, serta penyusunan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan kegiatan selanjutnya.
7. Memastikan pelayanan keluarga berencana dapat diberikan secara tepat waktu, termasuk pelayanan pasca persalinan yang menjadi salah satu upaya strategis dalam mencegah kehamilan yang berjarak terlalu dekat serta menurunkan risiko terjadinya stunting pada anak.

C. MANFAAT

Bagi Masyarakat

- Mendapatkan kemudahan akses pelayanan yang diselenggarakan di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal maupun tempat kerja, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk menuju lokasi pelayanan resmi.
- Mendapatkan informasi, penjelasan, dan edukasi yang lengkap, jelas, akurat, serta pendampingan yang berkelanjutan mengenai keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pola asuh anak, dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.
- Merasa lebih nyaman, dihargai, dan terjaga kerahasiaan serta privasinya saat menerima pelayanan maupun berkonsultasi dengan petugas, sehingga masyarakat lebih berani menyampaikan keluhan, pertanyaan, dan kebutuhan yang dimiliki.
- Memiliki kesempatan untuk memilih jenis alat kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan, usia, kebutuhan, dan rencana masa depan keluarga masing-masing dengan bimbingan dan pertimbangan dari tenaga kesehatan yang kompeten.
- Terhindar dari risiko terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan yang berjarak terlalu dekat, maupun kehamilan pada usia yang berisiko, yang semuanya berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Bagi Kader Keluarga Berencana

- Memperoleh ruang dan kesempatan untuk berkomunikasi, berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, serta menyelesaikan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lapangan.
- Mendapatkan peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan secara berkelanjutan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berkesinambungan.
- Memiliki saluran koordinasi dan komunikasi yang jelas, cepat, dan mudah dengan instansi pelaksana program, sehingga setiap laporan, masukan, atau permasalahan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dengan tepat.
- Meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas sebagai ujung tombak pelayanan dan penggerak masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
- Memperkuat jaringan kerja sama antar sesama kader sehingga tercipta kerja tim yang solid dan sinergis dalam mendukung keberhasilan program.

Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan program keluarga berencana, sehingga target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu.
- Mendapatkan data dan informasi yang akurat, lengkap, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi masyarakat, perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang dicapai, yang menjadi dasar utama dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan selanjutnya.

- Memperkuat hubungan kerja sama yang harmonis, saling mendukung, dan sinergis antara instansi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur masyarakat dalam upaya pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- Meningkatkan citra, kinerja, dan akuntabilitas instansi dalam memberikan pelayanan publik yang inovatif, responsif, berkeadilan, serta berorientasi pada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.
- Mempermudah dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah kerja.

Bagi Pemerintah Daerah

- Membantu mewujudkan tujuan pembangunan daerah di bidang kependudukan, yaitu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan daerah.
- Berkontribusi nyata dalam pencapaian target nasional maupun daerah terkait penurunan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta penurunan angka kemiskinan.
- Menjadi contoh dan rujukan inovasi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan tepat sasaran yang dapat diterapkan atau diadaptasi oleh daerah lain yang memiliki karakteristik kondisi wilayah dan permasalahan yang serupa.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi GERCEP KB dikembangkan dan diterapkan dengan tahapan yang terstruktur, sistematis, namun tetap berjalan cepat sesuai dengan kebutuhan mendesak yang ada di lapangan. Kecepatan proses ini dapat dicapai karena memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, menyederhanakan prosedur yang berbelit, serta berfokus pada solusi yang tepat sasaran. Berikut rincian tahapan dan waktu pelaksanaannya:

Tabel

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
1	Perumusan Konsep dan Analisis Masalah	1 Bulan	Pengumpulan data lapangan, diskusi dengan pihak terkait, identifikasi masalah utama, penyusunan konsep dasar inovasi dan tujuan yang akan dicapai.
2	Persiapan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya	1 Bulan	Penyusunan aturan kerja dan pedoman pelaksanaan, penyediaan peralatan medis dan pendukung, penyiapan dan pembekalan tenaga pelaksana, serta penyusunan dokumen administrasi dan pendukung lainnya.
3	Uji Coba Penerapan	1 Bulan	Dilaksanakan di satu desa percontohan untuk menguji efektivitas sistem, kemudahan pelaksanaan, serta menilai respon dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
4	Penyempurnaan Sistem	2 Minggu	Melakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan seluruh mekanisme kerja berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan selama masa uji coba.
5	Penerapan Menyeluruh	3 Bulan	Diterapkan secara bertahap di seluruh kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Empat Lawang, dengan pendampingan berkelanjutan agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

Dengan pola pelaksanaan seperti ini, inovasi dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat secara menyeluruh dalam waktu kurang dari 7 bulan sejak proses perencanaan dimulai. Kecepatan ini juga didukung oleh komitmen seluruh pihak yang terlibat serta dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai dari pemerintah daerah.

E. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor pendukung utama dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan inovasi ini. Teknologi yang digunakan dipilih yang sederhana, mudah dioperasikan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- Media Komunikasi dan Pendaftaran** Menggunakan aplikasi pesan instan WhatsApp sebagai sarana utama untuk:
 - Pendaftaran calon akseptor KB yang dilakukan oleh kader maupun masyarakat secara langsung
 - Penyampaian jadwal pelayanan yang akan dilaksanakan
 - Penyebaran informasi dan materi edukasi tentang keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta upaya pencegahan stunting
 - Komunikasi dan koordinasi antar kader, tenaga medis, dan tim pengelola program secara cepat dan efisien
- Pengolahan dan Penyimpanan Data**
 - Menggunakan perangkat komputer dan aplikasi pengolah data untuk mencatat, menyusun, dan menganalisis seluruh data yang diperoleh dari lapangan, seperti jumlah akseptor, jenis layanan yang diberikan, serta capaian program setiap bulannya
 - Data yang diolah disusun dalam bentuk tabel dan laporan yang rapi sehingga mudah dibaca dan dipahami, serta dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan kegiatan selanjutnya
- Pengarsipan dan Dokumentasi**
 - Seluruh dokumen kegiatan, catatan pelayanan, dan laporan hasil kerja disimpan dalam bentuk berkas elektronik yang teratur dan terstruktur
 - Sistem penyimpanan elektronik ini memudahkan pencarian data kapan saja dibutuhkan, menghemat ruang penyimpanan, serta menghindari risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik
- Penyebaran Informasi Secara Luas**

- Memanfaatkan media sosial dan grup komunikasi daring untuk menyebarkan informasi program kepada masyarakat secara lebih luas, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui dan memanfaatkan layanan yang disediakan
- Materi informasi disusun dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami, baik berupa tulisan, gambar, maupun video pendek.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi Gerakan Cepat Pelayanan KB (GERCEP KB) memiliki keunikan dan nilai tambah yang membedakannya dengan sistem pelayanan keluarga berencana yang telah berjalan sebelumnya. Berikut adalah aspek kebaruannya:

1. **Pergeseran Pola Pelayanan** Beralih dari pola pelayanan yang pasif, yaitu menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, menjadi pola pelayanan yang aktif, di mana tim pelayanan yang mendatangi masyarakat ke lokasi yang mudah dijangkau seperti rumah warga, balai desa, atau pos pelayanan desa. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang sulit diakses.
2. **Kecepatan dan Kemudahan Prosedur** Seluruh proses pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan layanan, disusun dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Pendaftaran dapat dilakukan kapan saja melalui pesan instan, dan jadwal pelayanan dapat ditetapkan sesuai dengan keinginan dan kesibukan masyarakat, sehingga prosesnya berjalan dengan cepat dan efisien.
3. **Pelayanan yang Terpadu dan Komprehensif** Selain memberikan layanan pemasangan alat kontrasepsi, program ini juga menyediakan edukasi dan konseling yang lengkap, mencakup penjelasan tentang manfaat alat kontrasepsi, cara perawatan, kemungkinan efek samping, serta informasi tentang kesehatan reproduksi, pola asuh anak, dan upaya pencegahan stunting. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan fisik, tetapi juga pengetahuan yang berguna untuk kesejahteraan keluarga.
4. **Kemudahan Akses dengan Teknologi Sederhana** Memanfaatkan teknologi komunikasi yang sudah umum digunakan oleh masyarakat, sehingga tidak memerlukan perangkat khusus atau keahlian teknis yang tinggi untuk mengakses layanan. Hal ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil sekalipun, dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan.
5. **Kemampuan Bergerak yang Tinggi** Tim pelayanan dilengkapi dengan peralatan medis dan bahan pelayanan yang disusun dalam paket yang ringan, praktis, dan mudah dibawa. Dengan demikian, tim dapat bergerak ke berbagai lokasi pelayanan dengan mudah meskipun melalui jalan yang sulit atau medan yang berbukit.
6. **Pelayanan yang Menjaga Privasi dan Kenyamanan** Layanan diselenggarakan dalam suasana yang akrab dan pribadi, sehingga masyarakat merasa nyaman, tidak canggung, dan berani menyampaikan segala keluhan atau pertanyaan yang dimiliki. Kerahasiaan kondisi kesehatan dan data pribadi masyarakat juga dijaga dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. **Penguatan Peran dan Kapasitas Kader** Kader keluarga berencana diberi peran yang lebih luas dan strategis dalam pelaksanaan program, serta mendapatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan kader sebagai ujung tombak yang efektif dalam menyampaikan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat.

B. DESAIN INOVASI

Desain pelaksanaan inovasi ini disusun dengan struktur dan alur kerja yang jelas, terukur, dan mudah dijalankan, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut rincian desainnya:

1. Struktur dan Pembagian Tugas Pelaksana

Tabel

Pihak yang Terlibat	Tugas dan Tanggung Jawab
Kader Keluarga Berencana (PPKBD/Sub-PPKBD)	- Mengumpulkan data dan mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan layanan keluarga berencana - Melakukan pendaftaran calon akseptor melalui aplikasi komunikasi - Menyampaikan informasi program dan mengedukasi masyarakat - Mendampingi masyarakat selama proses pelayanan berlangsung - Melaporkan perkembangan kegiatan dan kendala yang ditemukan di lapangan
Tim Medis dan Tenaga Kesehatan	- Melakukan pemeriksaan kesehatan awal untuk memastikan kesesuaian kondisi tubuh dengan jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan - Memberikan penjelasan dan konseling medis secara rinci kepada masyarakat - Melakukan pemasangan, perawatan, dan pencabutan alat kontrasepsi sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang berlaku - Mencatat hasil pemeriksaan dan pelayanan yang telah diberikan
Tim Koordinator Program	- Menyusun jadwal pelayanan berdasarkan data pendaftaran yang masuk - Menyiapkan peralatan medis, bahan habis pakai, dan perlengkapan pendukung lainnya - Mengumpulkan, mengolah, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat - Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan
Pimpinan Instansi	- Memberikan arahan, kebijakan, dan persetujuan pelaksanaan program - Menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang dibutuhkan - Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan program - Menetapkan langkah-langkah pengembangan dan penyempurnaan program ke depannya

2. Alur Pelayanan

Berikut adalah urutan proses pelayanan yang diterapkan dalam inovasi ini:

1. **Identifikasi Kebutuhan:** Kader mengunjungi rumah warga dan mengumpulkan informasi tentang pasangan usia subur yang membutuhkan layanan keluarga berencana, serta mencatat data diri dan kebutuhan masing-masing.
2. **Pendaftaran:** Data yang telah dikumpulkan disampaikan kepada tim koordinator melalui aplikasi pesan instan, disertai dengan keterangan lokasi dan waktu yang diinginkan untuk pelayanan.
3. **Penyusunan Jadwal:** Tim koordinator menyusun jadwal pelayanan berdasarkan jumlah pendaftar, lokasi, dan ketersediaan tim pelayanan, kemudian menyampaikan jadwal tersebut kepada kader dan masyarakat yang bersangkutan.
4. **Pelaksanaan Layanan:** Tim pelayanan datang ke lokasi yang telah disepakati, memberikan penjelasan dan edukasi, melakukan pemeriksaan kesehatan, serta memberikan layanan pemasangan atau perawatan alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masyarakat.
5. **Pencatatan dan Pelaporan:** Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dicatat dalam dokumen resmi, kemudian disusun menjadi laporan yang disampaikan kepada pimpinan instansi untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan.
6. **Pendampingan Berkelanjutan:** Kader tetap melakukan pendampingan setelah pelayanan selesai, untuk memantau kondisi kesehatan akseptor dan memberikan bantuan jika terjadi masalah atau keluhan.

3. Lokasi dan Waktu Pelayanan

- **Lokasi:** Disesuaikan dengan kondisi dan keinginan masyarakat, dapat berupa rumah warga, balai desa, kantor desa, atau pos pelayanan kesehatan yang ada di desa, sehingga mudah dijangkau dan tidak membutuhkan perjalanan yang jauh.
- **Waktu:** Disesuaikan dengan jadwal kegiatan masyarakat, terutama di luar jam kerja utama di lahan pertanian, seperti pagi hari sebelum berangkat kerja atau sore hari setelah pulang bekerja, sehingga masyarakat dapat mengikuti pelayanan dengan tenang dan tidak terganggu aktivitas sehari-hari.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES INOVASI

1. Identifikasi Permasalahan dan Pembentukan Tim Inovasi

Tujuan: Menemukan masalah utama yang menjadi penghambat pelaksanaan program dan menyusun struktur organisasi yang jelas untuk melaksanakan inovasi.

Langkah-langkah Pelaksanaan:

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi wilayah, jumlah penduduk, capaian pelayanan keluarga berencana, serta berbagai kendala yang dihadapi selama ini.
2. Melakukan wawancara dan diskusi dengan kader, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan warga untuk mendapatkan pandangan dan masukan yang beragam tentang permasalahan yang ada.

3. Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan masalah utama, penyebab terjadinya masalah, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan program.
4. Menyusun rumusan masalah secara jelas dan rinci, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan inovasi ini.
5. Membentuk tim pelaksana inovasi yang terdiri dari unsur yang relevan, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta menetapkan penanggung jawab utama kegiatan.
6. Menyusun jadwal kerja dan rencana kegiatan awal yang akan dilaksanakan oleh tim.

2. Penyusunan SOP Program Inovasi dan Dokumentasi

Tujuan: Menyusun pedoman kerja yang jelas dan lengkap agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara seragam, teratur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah Pelaksanaan:

1. Menyusun langkah-langkah kerja yang rinci untuk setiap tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil kerja.
2. Menetapkan standar kualitas pelayanan yang harus dipenuhi, seperti standar kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dalam memberikan layanan.
3. Menyusun pedoman penggunaan peralatan medis dan bahan pelayanan yang benar dan aman, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kesehatan.
4. Menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan, seperti formulir pendaftaran, catatan pemeriksaan, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.
5. Menyusun sistem pengarsipan dan penyimpanan dokumen yang rapi dan terstruktur, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, sehingga mudah dicari dan diakses kapan saja dibutuhkan.
6. Melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan dokumen yang telah disusun agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

3. Sosialisasi Inovasi dan Pelatihan Peserta

Tujuan: Menyampaikan informasi tentang inovasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan memberikan pembekalan kemampuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan benar.

Langkah-langkah Pelaksanaan:

1. Menyusun materi sosialisasi yang berisi penjelasan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, mekanisme kerja, dan aturan pelaksanaan inovasi ini.
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pimpinan instansi, tenaga pelaksana, kader, hingga masyarakat, baik melalui pertemuan langsung, penyuluhan, maupun media komunikasi yang tersedia.
3. Menyusun materi pelatihan yang sesuai dengan tugas dan peran masing-masing pihak, seperti pelatihan tentang teknik penyampaian informasi, penggunaan peralatan, prosedur pelayanan, dan cara mengatasi masalah yang mungkin muncul di lapangan.
4. Melaksanakan kegiatan pelatihan dengan metode yang mudah dipahami, seperti ceramah, diskusi, praktek langsung, dan studi kasus.
5. Melakukan evaluasi terhadap hasil sosialisasi dan pelatihan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam melaksanakan tugas masing-masing.

6. Melakukan perbaikan dan penambahan materi jika masih ditemukan kekurangan atau ketidakjelasan dalam pemahaman peserta.

4. Implementasi Program Inovasi dan Pendokumentasian

Tujuan: Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan, serta mencatat seluruh proses dan hasil kerja secara lengkap.

Langkah-langkah Pelaksanaan:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah disusun, dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan kualitas pelayanan.
2. Mencatat setiap kegiatan yang dilakukan, termasuk jumlah masyarakat yang dilayani, jenis layanan yang diberikan, kondisi kesehatan akseptor, serta berbagai kejadian penting yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.
3. Mengumpulkan seluruh dokumen, catatan, dan bukti kegiatan secara teratur, kemudian menyusunnya ke dalam berkas yang rapi sesuai dengan sistem pengarsipan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang dicatat, sehingga informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan instansi dan pihak yang berwenang, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Menyimpan seluruh dokumen kegiatan dengan baik, baik di tempat penyimpanan fisik maupun sistem penyimpanan elektronik yang aman.

5. Monitoring Berkala, Evaluasi, dan Penyempurnaan Sistem

Tujuan: Memantau jalannya kegiatan, menilai keberhasilan yang dicapai, serta melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program ke depannya.

Langkah-langkah Pelaksanaan:

1. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap seluruh aspek pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai.
2. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi, seperti data capaian layanan, tanggapan dan keluhan masyarakat, serta berbagai kendala yang ditemukan.
3. Melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, faktor pendukung dan penghambat yang ada, serta permasalahan yang perlu diselesaikan.
4. Menyusun laporan hasil evaluasi yang berisi gambaran umum pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, masalah yang ditemukan, serta usulan perbaikan yang perlu dilakukan.
5. Menetapkan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi, baik yang menyangkut mekanisme kerja, pembagian tugas, sarana prasarana, maupun aspek lainnya.
6. Melakukan penyesuaian dan pembaruan terhadap aturan kerja, pedoman pelaksanaan, dan sistem yang telah ditetapkan, agar selalu sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan

7. Melakukan sosialisasi kembali terhadap perubahan atau penyempurnaan sistem yang telah ditetapkan kepada seluruh pihak yang terlibat, agar semua memahami dan dapat melaksanakannya dengan baik.

BAB III

TAHAPAN PROSES PENCIPTAAN INOVASI

Berikut adalah tahapan lengkap dalam proses penyusunan, pengembangan, dan penerapan inovasi Gerakan Cepat Pelayanan KB (GERCEP KB) yang disusun sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditetapkan:

1. Tahap Inisiasi dan Identifikasi Permasalahan

Waktu Pelaksanaan: Minggu ke-1 s.d Minggu Ke-3 Januari 2025

Uraian Kegiatan:

- Melakukan pertemuan awal dan rapat koordinasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk membahas kondisi pelayanan yang ada saat ini, capaian yang telah dicapai, serta berbagai kendala yang dihadapi.
- Melakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan kegiatan tahun sebelumnya, data statistik kependudukan, serta dokumen perencanaan yang ada.
- Melakukan kunjungan langsung ke lapangan ke berbagai wilayah kerja untuk mengamati kondisi geografis, aksesibilitas wilayah, serta cara pelaksanaan pelayanan yang sedang berjalan.
- Melakukan wawancara dan diskusi dengan kader keluarga berencana, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan warga untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang permasalahan, kebutuhan, dan harapan mereka terkait pelayanan keluarga berencana.
- Melakukan analisis terhadap seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan permasalahan utama yang menjadi akar penyebab rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan, terutama penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.
- Menyusun rumusan masalah secara jelas dan rinci, serta menetapkan dasar pemikiran yang menjadi alasan perlunya pengembangan inovasi ini.

Hasil yang Dicapai:

- Diketahui dengan jelas berbagai hambatan dan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana.
- Tersusunnya gambaran kebutuhan dan harapan masyarakat serta pihak pelaksana terkait perbaikan sistem pelayanan.
- Tersusunnya dasar pemikiran dan latar belakang yang kuat untuk pengembangan inovasi GERCEP KB.

2. Tahap Perancangan Sistem dan Pengembangan Mekanisme Kerja

Waktu Pelaksanaan: Minggu ke-1 s.d. Minggu ke-3 Februari 2025

Uraian Kegiatan:

- Menyusun konsep dasar inovasi yang memuat tujuan, sasaran, prinsip kerja, serta strategi pelaksanaan yang akan diterapkan.
- Merancang struktur organisasi dan pembagian tugas pelaksana, mulai dari tingkat instansi hingga tingkat desa, dengan penjelasan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- Menyusun alur proses pelayanan secara rinci, mulai dari pendaftaran, penjadwalan, pelaksanaan layanan, hingga pelaporan hasil kerja, yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan sumber daya yang ada.
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman kerja bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi.
- Merancang sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan, termasuk mekanisme pendaftaran, pengolahan data, dan komunikasi antar pihak.
- Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, peralatan, bahan pelayanan, serta kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Menyusun rencana anggaran biaya yang rinci, meliputi sumber pendanaan serta rincian penggunaan dana untuk setiap jenis kegiatan dan kebutuhan.
- Melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan sistem dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan.

Hasil yang Dicapai:

- Tersusunnya konsep dasar dan rancangan sistem inovasi yang lengkap dan terstruktur.
- Tersusunnya SOP, pedoman kerja, dan dokumen pendukung lainnya yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.
- Tersusunnya rencana kebutuhan sumber daya dan rencana anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tahap Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana

Waktu Pelaksanaan: Minggu ke-2 Maret s.d. Minggu ke-3 April 2025

Uraian Kegiatan:

- Menyusun materi sosialisasi yang berisi penjelasan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam inovasi ini.
- Melakukan sosialisasi kepada pimpinan instansi, pejabat terkait, dan seluruh staf di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan pelaksanaan.
- Melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada tenaga kesehatan dan petugas lapangan yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan pelayanan.
- Melakukan sosialisasi dan pembentukan tim pelaksana di tingkat desa yang terdiri dari kader keluarga berencana, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya, serta memberikan penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas melalui berbagai cara, seperti pertemuan warga, penyuluhan kelompok, penyebaran brosur dan selebaran, serta pemanfaatan media komunikasi yang ada di lingkungan masyarakat.

- Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh tim pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka tentang cara melaksanakan tugas sesuai dengan sistem yang telah dirancang.
- Membentuk tim konsultasi yang berfungsi untuk memberikan bimbingan, menjawab pertanyaan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.

Hasil yang Dicapai:

- Seluruh pihak yang terlibat memahami dengan baik tujuan, manfaat, dan cara pelaksanaan inovasi GERCEP KB.
- Terbentuknya tim pelaksana yang siap dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
- Masyarakat mengetahui dan memahami tentang keberadaan, manfaat, serta cara mengakses pelayanan yang disediakan.

4. Tahap Uji Coba dan Penerapan Awal

Waktu Pelaksanaan: Minggu ke-2 s.d Minggu ke-3 Juli 2025

Uraian Kegiatan:

- Memilih satu desa percontohan yang mewakili karakteristik wilayah Kabupaten Empat Lawang, baik dari segi kondisi geografis, tingkat aksesibilitas, maupun tingkat capaian pelayanan yang telah ada sebelumnya.
- Melakukan persiapan akhir di lokasi uji coba, meliputi penyiapan sarana dan prasarana, pengecekan kelengkapan peralatan dan bahan pelayanan, serta pengecekan kesiapan tim pelaksana.
- Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelayanan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah dirancang, mulai dari proses pendaftaran, penjadwalan, hingga pelaksanaan layanan dan pelaporan hasil kerja.
- Melakukan pengamatan dan pencatatan secara rinci terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan, baik yang berjalan dengan baik maupun yang masih ditemukan kendala atau kekurangan.
- Mengumpulkan tanggapan, pendapat, dan saran dari masyarakat yang menerima layanan, kader, tenaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya mengenai kualitas pelayanan yang diberikan serta kemudahan sistem yang diterapkan.
- Mencatat berbagai permasalahan, kesulitan, atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan uji coba, serta mengidentifikasi penyebab terjadinya permasalahan tersebut.
- Melakukan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan untuk melihat efektivitas dan efisiensi sistem yang diterapkan.

Hasil yang Dicapai:

- Diketahui dengan jelas kelebihan dan kekurangan sistem inovasi yang telah dirancang.
- Tersusunnya catatan permasalahan dan usulan perbaikan yang perlu dilakukan untuk penyempurnaan sistem.

- Dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

5. Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan Menyeluruh

Waktu Pelaksanaan: Minggu ke-3 Agustus s.d Minggu ke-3 September 2025

Uraian Kegiatan:

- Melakukan pertemuan evaluasi yang melibatkan seluruh tim pelaksana dan pihak terkait untuk membahas hasil pelaksanaan uji coba secara keseluruhan.
- Melakukan analisis mendalam terhadap seluruh data, catatan, dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan uji coba untuk menilai kinerja sistem yang telah diterapkan.
- Menyusun daftar perbaikan yang perlu dilakukan, baik yang menyangkut aspek teknis pelayanan, mekanisme kerja, pembagian tugas, maupun aspek pendukung lainnya.
- Melakukan penyempurnaan terhadap rancangan sistem, SOP, pedoman kerja, dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan hasil evaluasi dan usulan perbaikan yang telah disepakati.
- Melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar sesuai dengan sistem yang telah disempurnakan.
- Melakukan pembekalan dan penyegaran kembali kepada seluruh tim pelaksana mengenai perubahan dan penyempurnaan yang telah dilakukan agar mereka dapat melaksanakannya dengan baik.
- Menetapkan rencana pelaksanaan penyebaran dan penerapan inovasi ini secara menyeluruh ke seluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan jadwal dan tahapan yang teratur.

Hasil yang Dicapai:

- Tersusunnya sistem inovasi yang sudah disempurnakan dan siap diterapkan secara luas.
- Tersusunnya rencana pelaksanaan penerapan menyeluruh yang jelas dan terstruktur.
- Seluruh pihak pelaksana memahami perubahan yang telah dilakukan dan siap untuk melaksanakannya dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan dalam proposal inovasi *Gerakan Cepat Pelayanan KB (GERCEP KB)*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, pola kehidupan masyarakat yang sebagian besar bekerja di lahan pertanian yang jauh dari pemukiman, serta berbagai kendala sosial dan pengetahuan menjadi penyebab utama rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan keluarga berencana, khususnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Empat Lawang.
2. Inovasi GERCEP KB dirancang sebagai solusi yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah, dengan mengubah pola pelayanan dari yang semula pasif menjadi aktif, memanfaatkan teknologi yang sederhana namun efektif, serta memberikan pelayanan yang terpadu dan menjaga kenyamanan serta privasi masyarakat.
3. Inovasi ini memiliki berbagai keunggulan dan kebaruan yang membedakannya dengan sistem pelayanan yang ada sebelumnya, antara lain kecepatan proses, kemudahan akses, pelayanan yang komprehensif, penguatan peran kader, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Pelaksanaan inovasi ini disusun dengan tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan, persiapan, uji coba, evaluasi, hingga penerapan menyeluruh, sehingga dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Penerapan inovasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, kader, instansi pelaksana, serta pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan keluarga berencana, menurunkan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan terencana.
6. Keberhasilan pelaksanaan inovasi ini sangat ditentukan oleh komitmen, kerja sama, dan sinergi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah, tenaga kesehatan, kader, maupun masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, diharapkan dapat memberikan dukungan penuh baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun fasilitas yang dibutuhkan agar inovasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan.
2. Kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta instansi terkait lainnya, diharapkan dapat melaksanakan inovasi ini sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan, serta terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan.
3. Kepada seluruh tenaga pelaksana dan kader keluarga berencana, diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan secara berkelanjutan, serta memberikan pelayanan dengan sepenuh hati demi kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Kepada masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan, memberikan masukan dan tanggapan yang membangun, serta ikut menyebarluaskan informasi tentang manfaat dan keunggulan program ini kepada lingkungan sekitar.
5. Kepada seluruh pihak terkait, diharapkan dapat terus melakukan penyempurnaan dan pengembangan inovasi ini sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan yang ada, sehingga manfaat yang diberikan dapat terus meningkat dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

**PEMERINTAH KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

